

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2007;

b. bahwa guna mencapai pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



29. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 771), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokol Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 36);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**  
Dan  
**BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN :

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 633.868.928.035,82 bertambah sejumlah Rp. 42.189.126.943,40 sehingga menjadi Rp. 676.058.054.978,83 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 575.888.726.619,98	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.990.040.925,09</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 585.878.767.545,08	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 622.415.397.650,42	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.953.663.204,15 +</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 658.369.060.854,58 -	
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	<u>(72.490.293.309,50)</u>	
3. PEMBIAYAAN :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 57.980.201.415,44	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.199.086.018,31 +</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 90.179.287.433,75	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 11.453.530.385,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.235.463.739,25 +</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 17.688.994.124,25	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	<u>Rp. 72.490.293.309,50</u>	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. -</u>	

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 16.505.249.960,16	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.518.137.167,10 +</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 20.023.387.127,26	

b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	554.387.436.659,82	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.231.903.758,00</u>	+
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.		556.619.340.417,82
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp.	4.996.040.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.240.000.000,00</u>	+
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		9.236.040.000,00
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	1.318.074.850,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(38.100.000,00)</u>	+
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.		1.279.974.850,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	4.838.598.432,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>348.651.928,00</u>	+
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.		5.187.250.360,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	2.016.000.002,16	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	+
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		2.016.000.002,16
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah			
1) Semula	Rp.	8.332.576.676,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.207.585.239,10</u>	+
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		11.540.161.915,10
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	19.564.436.659,82	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.231.903.758,00</u>	+



b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 488.394.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 488.394.000.000,00	
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 46.429.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 46.429.000.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah hibah setelah Perubahan	Rp. -	
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp. -	
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 4.996.040.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.750.000.000,00</u>	+
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 7.746.040.000,00	
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. -	
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.490.000.000,00</u>	+
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 1.490.000.000,00	

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	221.193.434.210,27
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.265.987.495,44 +
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	228.459.421.705,71

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	401.221.963.440,15
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.687.675.708,72 +
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	429.909.639.148,87

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	175.796.744.210,27
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.415.728.970,44 +
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	181.212.473.180,71

b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	-

c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00 +
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	-

e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	13.976.590.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	628.228.625,00 +

f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	+
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	29.170.100.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(461.600.100,00)	+
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	28.708.499.900,00	
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	1.250.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	683.630.000,00	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.933.630.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis belanja :			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	41.341.569.451,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.628.168.981,00	+
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	43.969.738.442,00	
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	151.128.798.107,84	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.363.754.111,00	+
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	170.492.552.218,84	
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	208.691.595.871,31	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.755.752.616,72	+
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	215.447.348.488,03	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	57.980.201.415,44
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	32.199.086.018,31
		+



b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	11.453.530.385,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.235.463.739,25</u>	+
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		17.688.994.124,25
 (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	57.980.201.415,44	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.199.086.018,31</u>	+
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		90.179.287.433,75
 b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	+
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		
 c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	+
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		
 d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	+
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		
 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	140.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	+
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		140.000.000,00
 f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	+
Jumlah piutang setelah Perubahan	Rp.		

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	10.453.530.385,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perut Rp. 10.453.530.385,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.235.463.739,25 +

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 6.235.463.739,25

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Rp. 1.000.000.000,00  
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapat, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

12

Pasal 6

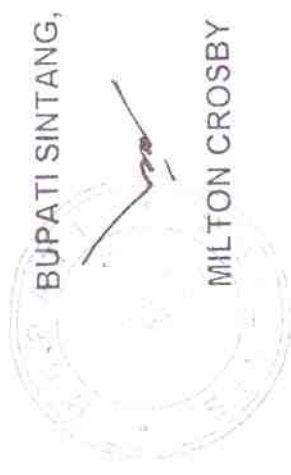
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 6 Nopember 2007



Diundangkan di Sintang  
Pada tanggal 6 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ABDUSSAMAD ISMAIL  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2007 NOMOR 3 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3